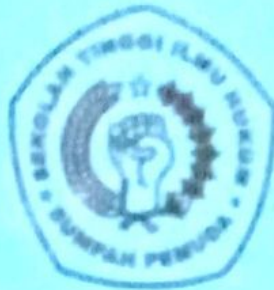


**SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL
(SIMPANAS) DALAM MENCEGAH SERTIPIKAT GANDA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RAMA APREDI PUTRA
011400323.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAMA APREDI PUTRA
NIM : 011400323.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DALAM
MENCEGAH SERTIPIKAT GANDA

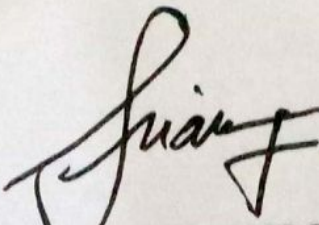


Palembang, 27 Desember 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

**SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL
(SIMTANAS) DALAM MENCEGAH SERTIPIKAT GANDA**

Penulis,
RAMA APREDI PUTRA
NIM : 011400323.P

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Hj. SITI SAHARA, SH., M.Si.

ABSTRAK

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan Pasal 1 huruf B, ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Yang meliputi penyusunan basis data tanah-tanah asset Negara / pemerintah daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari : investasi asset Negara; pembangunan database asset yang memuat informasi penguasaan / pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pendataan kadastral dalam rangka P4T, Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan, Penggunaan pemanfaatan Tanah melalui sistem informasi geografi.

Kata Kunci : SIMTANAS, Database, Badan Pertanahan Nasional.

21

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif.
2. Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam mencegah sertipikat ganda menggunakan aplikasi KKP web. Aplikasi ini menghimpun seluruh data pertanahan dan menyajikan informasi mengenai suatu bidang tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Informasi yang terdapat di dalamnya diambil berdasarkan data yang diajukan oleh masyarakat saat mendaftarkan suatu bidang tanah. Akan tetapi, data yang diajukan oleh masyarakat masih dilakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi yang disebut Geospasial KKP. Aplikasi turunan dari KKP web ini memberikan gambaran suatu bidang tanah yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dengan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & MAKALAH :

- Adi Kusnadi, *Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta, 1999.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Maju Mundur, Bandung, 1999.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1998.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Enemark S, dalam tulisannya yang berjudul “*Understanding the Land Mangement Pardigm Need for Establishing Sustainable National Concept*” dalam the Global Magazines for Geomatic, Januari 2006.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Supranowo, *Sertifikat dan Permasalahannya*, Makalah pada Seminar Nasional “*Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*” Yogyakarta, 9 Juli 1992.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	13
B. Pengertian Sertipikat Ganda.....	18
C. Akibat Hukum Sertipikat Ganda.....	24
D. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.....	25
E. Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).....	29
BAB III SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) DALAM MENCEGAH SERTIPIKAT GANDA	
A. Penyiapan Data Elektronik Dalam Mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).....	38
B. Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam mencegah sertipikat ganda.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	